



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERMASALAHAN PSN DI SEKTOR ENERGI

Juli Panglima Saragih
Analisis Legislatif Ahli Madya
juli.saragih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah telah berhasil menyelesaikan 161 Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 8 tahun terakhir, termasuk PSN di sektor energi yang dikelola oleh PT Pertamina (persero). Direktur Utama PT Pertamina (persero), Nicke Widyawati, menyatakan bahwa PSN yang dikerjakan oleh PT Pertamina (persero) bertujuan untuk membangun ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Di samping itu, PSN ini juga memberikan manfaat signifikan, seperti pengurangan impor, penurunan emisi, serta dukungan terhadap perekonomian nasional melalui keterlibatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan penggunaan teknologi dalam negeri.

Namun, sejumlah PSN di sektor energi masih memerlukan perhatian karena berbagai masalah yang menghambat pelaksanaannya di lapangan sehingga belum terselesaikan. Dari 15 PSN di sektor energi, salah satunya yang bermasalah adalah proyek pembangunan fasilitas pengolahan (kilang) minyak mentah (*grass root refinery*) di Kabupaten Tuban Jawa Timur, dengan rencana investasi sebesar USD13,5 miliar. Menurut catatan, pembebasan lahan untuk proyek ini telah selesai, namun persoalan muncul dalam hal pembiayaannya. Dalam pembangunan kilang minyak mentah di Tuban ini, PT Pertamina (persero) bekerja sama dengan mitra asal Rusia, yaitu Rosneft Singapore Pte Ltd (Rosneft). Pada awalnya, Rosneft menyanggupi untuk membiayai proyek tersebut, tetapi kemudian Rosneft terkena sanksi akibat konflik Rusia-Ukraina sehingga membuat keputusan *final investment decision* (FID) beberapa kali tertunda. Menyikapi hal ini, PT Kilang Pertamina Internasional sebenarnya telah mengajukan usulan penambahan investor baru kepada Rosneft, namun Rosneft belum menyetujui penyertaan modal untuk proyek tersebut. Kementerian ESDM juga sudah beberapa kali menagih kepastian soal pembiayaan kepada Rosneft, tetapi sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda positif.

PSN lainnya di sektor energi yang juga bermasalah adalah proyek penghiliran batu bara menjadi *dimethyl ether* (DME) yang rencananya akan dikerjakan oleh PT Bukit Asam Tbk. Pengerjaan proyek ini terhambat karena satu-satunya investor, yaitu Air Products and Chemicals Inc memilih hengkang satu tahun lebih pasca-penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah. Saat ini pemerintah sedang mencari investor baru yang memiliki teknologi dan pendanaan untuk proyek tersebut. Selain itu, terdapat proyek di sektor energi yang sebelumnya masuk dalam PSN, namun akhirnya dikeluarkan dari daftar PSN pada akhir Juli 2022 lalu, yaitu proyek pembangunan *smelter grade alumina refinery* (SGAR) Mempawah. Proyek ini dikeluarkan dari daftar PSN karena pengerjaannya yang tidak kunjung selesai akibat permasalahan kontraktor. Saat ini proyek SGAR Mempawah tersebut kembali diusulkan masuk dalam daftar PSN oleh PT Indonesia Asahan Aluminium dan masih dalam proses evaluasi.

Berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan sejumlah PSN di sektor energi harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah agar dapat terselesaikan sesuai dengan target

waktu yang telah ditetapkan. PSN di sektor energi sangat penting tidak hanya karena menyangkut hajat hidup orang banyak dengan investasi besar, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan suplai dan ketahanan energi nasional ke depan.

Atensi DPR

Beberapa proyek dari sejumlah PSN di sektor energi masih bermasalah sehingga tidak kunjung terselesaikan. Padahal PSN di sektor energi merupakan proyek penting terkait dengan upaya menjamin keberlanjutan suplai dalam proses produksi dan mencapai ketahanan energi nasional. Permasalahan terhambatnya pengerjaan PSN di sektor energi hendaknya mendapat perhatian serius oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi. Komisi VII DPR RI perlu meminta pemerintah untuk menjelaskan secara detail permasalahan apa saja yang menghambat pengerjaan sejumlah PSN di sektor energi, baik di level pemerintah maupun di lapangan. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong percepatan pengerjaan PSN di sektor energi agar dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Sumber

Bisnis Indonesia, 14 September 2023; dan
businessnews.co.id, 14 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023